Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 205 hal: 634-647



ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA KENDARI TAHUN 2000–2023

La Tondi*1) Farhan Ardiansyah2), Rostin3)

1),2)3) Universitas Halu Oleo Corresponding Author latondi2016@gamil.com

Abstract. Kendari City during the period 2000-2023. A quantitative method was used with a multiple linear regression approach, utilizing SPSS software for data analysis. The independent variables in this study are government expenditure and inflation, while the dependent variable is economic growth. The results show that, partially, government expenditure has a positive and significant effect on economic growth, whereas inflation does not have a significant effect. However, simultaneously, both variables are proven to significantly influence economic growth, as indicated by a significance value of 0.000 (< 0.05). These findings suggest that government spending plays a crucial role in driving economic growth, while maintaining stable inflation is also important for preserving a healthy economic environment. Therefore, effective fiscal policies and proper inflation control are essential to support sustainable economic growth in Kendari City.

Keywords: Government Expenditure, Inflation, Economic Growth

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari pada periode 2000–2023. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah dan inflasi, sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan. Namun secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Temuan ini menegaskan pentingnya peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta perlunya menjaga inflasi tetap stabil untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah Kota Kendari mengoptimalkan alokasi anggaran publik dan menjaga stabilitas harga guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi.

1.Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, sejumlah faktor makroekonomi memiliki peran krusial, terutama belanja pemerintah dan tingkat inflasi. Belanja pemerintah, sebagai bagian dari kebijakan fiskal, berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi melalui pengeluaran di berbagai sektor penting seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program sosial. Kenaikan pengeluaran ini diharapkan mampu

634

Submitted: 10-07-2025 - Accepted: 05-09-2025 - Published: 14-10-2025 embistek.org

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



menggerakkan permintaan agregat dan mendorong investasi, sehingga berkontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Inflasi, di sisi lain, merupakan kondisi yang mencerminkan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Jika terkendali, inflasi dapat menciptakan lingkungan usaha yang stabil. Namun, ketika berada di luar batas wajar, inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, serta menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha. Oleh sebab itu, inflasi menjadi aspek penting yang sering menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan pengeluaran fiskal yang efektif dengan pengendalian inflasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal. Dalam konteks tersebut, diperlukan studi empiris untuk mengetahui sejauh mana pengeluaran pemerintah dan inflasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pengendalian harga guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi global dan domestik, peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi menjadi semakin signifikan. Kebijakan fiskal yang dijalankan melalui belanja pemerintah tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial, mempercepat pembangunan, dan mendorong produktivitas nasional. Namun demikian, dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada efisiensi distribusi anggaran serta sektor-sektor yang menjadi prioritas. Alokasi anggaran yang lebih dominan untuk konsumsi yang tidak produktif dapat menurunkan efektivitasnya terhadap pertumbuhan. Dalam hal inflasi, stabilitas harga menjadi elemen penting yang menentukan keberlanjutan investasi dan daya saing ekonomi. Pemerintah bersama bank sentral memegang peran kunci dalam mengelola inflasi melalui kombinasi kebijakan fiskal dan moneter. Ketidakstabilan inflasi tidak hanya mempengaruhi konsumsi rumah tangga, tetapi juga berimplikasi pada keputusan investasi jangka panjang para pelaku usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk menghindari dampak kebijakan yang kontraproduktif.

Dengan mempertimbangkan pentingnya dua variabel utama tersebut—pengeluaran pemerintah dan inflasi—dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan dan dampak keduanya secara empiris. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, khususnya dalam pengelolaan fiskal dan pengendalian inflasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks daerah, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pembangunan daerah berhasil dilaksanakan. Kota Kendari, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini tidak lepas dari kontribusi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran serta dinamika inflasi yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi lokal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari, khususnya terkait pengaruh belanja pemerintah dan inflasi terhadap kesejahteraan

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



masyarakat. Belanja pemerintah daerah di Kendari mencakup berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Harapannya, anggaran tersebut mampu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Namun, efektivitas belanja tersebut bergantung pada seberapa baik perencanaan dan pelaksanaannya, serta sejauh mana kebijakan itu dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Sementara itu, tingkat inflasi di kota juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Perubahan harga barang dan jasa dapat memengaruhi daya beli serta kestabilan ekonomi lokal. Jika tidak terkendali, inflasi dapat menghambat konsumsi dan investasi yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang stabil memberikan kepastian bagi dunia usaha dan mendorong iklim investasi yang sehat.

Kota Kendari menjadi objek penelitian yang menarik karena memiliki karakteristik ekonomi daerah yang unik dan berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Dengan memahami secara mendalam pengaruh pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan

2. Tinjauan Pustaka Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam peningkatan output nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Todaro dan Smith (2015), pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa tambahan dari waktu ke waktu. Indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah adalah PDRB atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional secara riil dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, yang menggambarkan peningkatan nilai output ekonomi dari waktu ke waktu tanpa pengaruh inflasi.

Menurut pandangan Adam Smith, pengembangan hak milik (property rights), spesialisasi dan pembagian kerja merupakan faktor-faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis (Arsyad, 2017). Adam Smith, membagi sejarah peradaban manusia dalam empat tahapan yaitu tahap berburu (hunting), tahap beternak (pastoral), tahap pertanian (agriculture), dan tahap perdagangan (commerce). Smith juga menambahkan bahwa seiring dengan laju pertumbuhan perekonomiannya, masyarakat akan bergerak dari tahap masyarakat tradisional menuju tahap masyarakat modern yang kapitalis. Dalam pemikirannya, Smith mengkritik pandangan kaum merkantilisme. Menurut Smith, kepemilikan atas emas dan erak oleh suatu negara bukanlah suatu ukuran kekayaan nasional, karena kekayaan nasional haruslah bersumber pada "hasil kerja" suatu negara. Kekayaan nasional dapat dibentuk oleh dua hal yaitu, (1) ketrampilan dan penggunaan tenaga kerja secara efisien, dan (2) pertimbangan yang tepat antara tenaga kerja yang produktif dan tenaga kerja nonproduktif. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow menunjukan adanya hasil yang semakin menurun dari tenaga kerja dan

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



modal secara terpisah serta hasil konstan dari kedua faktor itu secara bersama-sama. Kemajuan teknologi menjadi faktor residu yang menjelaskan pertumbuhan jangka panjang, dan tingkat pertumbuhan menurut asumsi Solow dan para pemikir pertumbuhan neoklasik lainnya, ditentukan secara eksogen (dari luar) yang artinya bebas dari pengaruh faktor-faktor lainnya dalam model itu (Todaro, 2011).

Menurut Sukirno (2016), Faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang lebih penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Sumbangan yang penting dari teori pertumbuhan Neo-Klasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi

Pegeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas negara, baik konsumtif maupun produktif. Dalam konteks ekonomi daerah, belanja pemerintah daerah diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan sosial lainnya. Menurut teori Keynesian, peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan semua bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pengeluaran pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah memiliki fungsi alokatif untuk memperbesar investasi publik dan menstimulasi sektor-sektor strategis.

Teori Keynesian menyatakan bahwa dalam kondisi perekonomian yang lesu, pemerintah harus meningkatkan belanja untuk mendorong permintaan agregat. Belanja pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor produktif diyakini mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Marcelinus (2020) Pengeluaran pemerintah merupakan anggaran maupun belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari barang-barang modal, barang konsumsi, dan atas jasa- jasa. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang tetap dengan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dalam pembangunan, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah dan proporsinya terhadap pembangunan nasional.

Adapun Teori Pengeluaran Pemerintah yang dikemukan oleh Wagner menyampaikan bahwa apabila suatu perekonomian dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat secara relatif maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Teori Peacok dan Wiserman bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sementara itu masyarakat menolak untuk membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang besar tersebut. Namun demikian

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



masyarakat juga memiliki tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkatan yang dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pada pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintah sehingga masyarakat mempunyai tingkat kesediaan dalam membayar pajak. Teori Rostow dan Musgrave Teori ini mereka menghubungkan biaya pemerintah pada tahap pembangunan ekonomi, pada tahap awal perkembangan ekonomi menurut mereka rasio – rasio pengeluaran pemerintah relatif besar terhadap pendapatan nasional. Menurut Musgrave, selama proses pembangunan, rasio total investasi proporsi pendapatan nasional meningkat, tetapi proporsi pendapatan nasional menurun. Rostow berfikir pada tahap perkembangan selanjutnya, kegiatan pemerintah berubah dari penyediaan menjadi layanan, pengeluaran untuk layanan sosial seperti infrastruktur ekonomi kesehatan dan pendidikan.

Inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian dalam periode tertentu. Menurut Boediono (2001), inflasi dapat berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat dan stabilitasnya. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu kegiatan produksi, menurunkan daya beli masyarakat, dan menyebabkan ketidakpastian dalam investasi. Inflasi didefinisikan juga sebagai suatu kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu (Mankiw, 2018). Inflasi dapat bersumber dari sisi permintaan (demand-pull inflation) maupun sisi biaya (cost-push inflation). Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian dalam investasi.

Phillips Curve, ada hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, yang menunjukkan bahwa inflasi rendah bisa berasosiasi dengan pertumbuhan ekonomi yang juga rendah. Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi syarat penting dalam mendukung iklim ekonomi yang sehat. Secara singkat inflasi dapat diartikan sebagai suatu kecendrungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi yang terjadi membuat semakin melemahnya suatu daya beli yang diikuti dengan semakin menurunnya nilai rill dari mata uang suatu negara tersebut. Milton Friedmann yang berkembang dalam makro ekonomi yang dikenal dengan kelompok monetaris. Kaum monetaris berpendapat bahwa inflasi hanya dapat terjadi bila ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Harga-harga akan meningkat dikarenakan adanya kelebihan uang yang diciptakan atau diproduksi oleh bank sentral. Meningkatnya jumlah uang yang beredar berarti meningkatkan saldo kas yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen dan akibatnya akan meningkatkan pengeluaran konsumsi di masyarakat. Kenaikan konsumsi masyarakat akan mengakibatkan kenaikan harga sehingga berakibat terjadinya inflasi.

Menurut teori Keynes pendekatan ini mengatakan bahwa inflasi terjadi dikarenakan suatu kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga proses inflasi merupakan proses tarik-menarik antar golongan masyarakat untuk memperoleh bagian masyarakat yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat sendiri. Golongan yang berhasil dengan aspirasinya akan mencerminkan keberhasilan dalam suatu permintaan yang efektif. Kalau hal ini selalu terjadi maka akan timbul suatu kesenjangan inflasi atau (inflationary gap). Tekanan dari golongan ini akan mengakibatkan kenaikan biaya (cost push). Kesimpulan dari teori ini, inflasi terjadi karena

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Dalam teorinya, Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonomisnya. Proses perebutan rizki antar golongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara teori, pengeluaran pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran agregat. Namun, apabila tidak dikelola dengan efisien atau dibarengi dengan inflasi tinggi, efek positifnya dapat berkurang. Di sisi lain, inflasi yang terkendali mampu menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan mendukung pertumbuhan, namun inflasi yang tidak terkendali dapat menghambat aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kemajuan suatu negara. Dua faktor yang sering dibahas dalam konteks ini adalah pengeluaran pemerintah dan inflasi. Keduanya memainkan peran signifikan dalam membentuk dinamika ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Teori-teori ekonomi klasik dan modern memberikan penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana kedua variabel ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Keynesian, pengeluaran pemerintah merupakan alat utama dalam mengelola permintaan agregat. Dalam kondisi ekonomi lesu atau saat sektor swasta enggan berinvestasi, intervensi pemerintah melalui belanja publik dapat meningkatkan permintaan total, mendorong produksi, dan akhirnya menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, efektivitasnya sangat tergantung pada bagaimana dan ke mana anggaran tersebut dialokasikan. Pengeluaran produktif, seperti pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, akan lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas jangka panjang dibandingkan pengeluaran konsumtif.

Sebaliknya, inflasi, menurut pandangan monetaris yang dipelopori oleh Milton Friedman, merupakan fenomena moneter yang berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi jika tidak dikendalikan. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian harga, mengganggu daya beli masyarakat, serta menurunkan insentif untuk menabung dan berinvestasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, inflasi yang moderat dan stabil sering dianggap sebagai indikator ekonomi yang sehat karena mencerminkan permintaan yang tumbuh dan adanya ruang bagi peningkatan upah serta keuntungan usaha.

Dalam kerangka model pertumbuhan Solow, kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (yang memengaruhi inflasi) dapat memengaruhi tabungan nasional dan investasi. Jika pengeluaran pemerintah diarahkan untuk meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi, maka hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, inflasi tinggi cenderung menurunkan efisiensi investasi dan tabungan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang kompleks namun saling terkait antara pengeluaran pemerintah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara peran aktif dalam ekonomi melalui pengeluaran publik dengan kebijakan moneter yang mampu menjaga kestabilan harga. Kombinasi yang tepat dari kedua kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan.

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel independen, yaitu pengeluaran pemerintah dan inflasi, terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi Kota Kendari selama periode 2000–2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup:, Data pengeluaran pemerintah Kota Kendari (dalam APBD), Data inflasi tahunan Kota Kendari, Data pertumbuhan ekonomi Kota Kendari (PDRB atas dasar harga konstan)

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengakses dan menyalin data dari publikasi resmi tahunan seperti Laporan Keuangan Daerah, Laporan PDRB, dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah. Data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS Versi 21. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut\

$Y=\alpha+\beta 1X1+\beta 2X2+\epsilon$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB riil)

X1 = Pengeluaran Pemerintah

X2 = Inflasi

 $\alpha = Konstanta$

 $\beta 1,\beta 2 = \text{Koefisien regresi}$

 $\varepsilon = Error term$

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk menentukan arah hubungan antara variabel independen (X1, X2) dan variabel dependen (Y), apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif. Selain itu, analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila variabel independen mengalami perubahan, baik peningkatan maupun penurunan

Tabel 4. 1 Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized t Coefficients		Sig.
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8.904	2.089		-4.262	.000
Pengeluaran Pemerintah	.006	.001	.848	7.442	.000
Inflasi	.002	.006	.045	.398	.695

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21, 2024

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Y = -8.904 + 0.006X1 + 0.002X2

Penjelasan koefisien-koefisien regresi adalah sebagai berikut:

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



- 1. Konstanta sebesar -8.904 berarti bahwa jika variabel Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Inflasi (X2) diasumsikan tetap, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan menurun sebesar 8.904 persen.
- 2. Koefisien untuk Pengeluaran Pemerintah sebesar 0.006 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar 1 satuan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.006 satuan, dengan asumsi Inflasi (X2) tetap.
- 3. Koefisien regresi untuk Inflasi sebesar 0.002 menunjukkan bahwa kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.002 persen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Data dikatakan normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0.05 (P > 0.05), dan sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0.05 (P < 0.05), data dianggap tidak normal.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

		Pengeluaran	Inflasi
		Pemerintah	
N		24	24
	Mean	2723.9583	3.4167
Normal Parameters ^{a,b}			
	Std. Deviation	71.49976	9.73973
	Absolute	.151	.238
Most Extreme	Positive	.151	.190
Differences			
	Negative	148	238
Kolmogorov-Smirnov Z	-	.739	1.165
Asymp. Sig. (2-tailed)		.646	.132

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21, 2024

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05, yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut **Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya hubungan linear yang sangat tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Salah satu metode yang digunakan adalah Variance Inflation Factor (VIF), yang merupakan kebalikan dari toleransi.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics				
Tolerance	VIF			
.982	1.019			
.982	1.019			

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai tolerance sebesar 0.982 dan nilai VIF sebesar 1.019 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel-

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



variabel independen

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat ketidaksamaan variansi residual antara pengamatan satu dengan lainnya. Jika variansi residualnya konstan, maka model disebut homoskedastis, sedangkan jika berbeda, itu disebut heteroskedastis.

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.075	1.387		.775	.447
Pengeluaran	.000	.001	141	650	.523
Pemerintah					
Inflasi	.002	.004	.123	.569	.576

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21, 2024

Hasil uji menunjukkan bahwa pada variabel Pengeluaran Pemerintah (X1) nilai signifikansinya adalah 0.523 (> 0.05), yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel tersebut. Demikian juga, pada variabel Inflasi (X2), nilai signifikansi sebesar 0.576 (> 0.05) menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1. Model regresi yang baik adalah yang tidak menunjukkan autokorelasi

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.856a	.732	.707	.26081	1.124

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21, 2024

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai 1.124, yang lebih rendah dari nilai dU (1.5408) dan lebih tinggi dari nilai dL (1.1471) pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model ini.

Koefisien Determinasi R Square (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi data. Nilai R² yang tinggi menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan variasi yang besar dalam data

Tabel 4.6 Hasil Koefisien Determinasi R Square (R²)

			1 \
R	R Square	Adjusted	Std. Error of the
		Square	Estimate
.856a	.733	.708	.26039

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21, 2024

Hasil uji menunjukkan nilai R² sebesar 0.773, yang berarti variabel-variabel independen dalam model ini menjelaskan 77,3% variasi pada variabel dependen,

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji Hipotesis Uji t (Uji Parsial)

Untuk menguji hipotesis, dilakukan uji parsial menggunakan uji t.

Tabel 4.7 Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8.904	2.089		-4.262	.000
Pengeluaran Pemerintah	.006	.001	.848	7.442	.000
Inflasi	.002	.006	.045	.398	.695

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21, 2024

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa

- a. Pengeluaran Pemerintah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Oleh karena itu, Hipotesis H1 diterima.
- b. Inflasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), dengan nilai signifikansi 0.695 > 0.05. Oleh karena itu, Hipotesis H1 ditolak.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8 Hasil Uji F (Uji Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3.905	2	1.952	28.704	.000b
Residual	1.428	21	.068		
Total	5.333	23			

Sumber: Data diolah SPSS versi 21, 2024

Berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Inflasi (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh, variabel pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh yang signifikan dan bersifat positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah cenderung diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengelola perekonomian. Melalui penetapan anggaran tahunan yang tercermin dalam dokumen APBN dan APBD, pemerintah menentukan besarnya pengeluaran dan penerimaan negara dengan tujuan menjaga stabilitas harga, meningkatkan output, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah akan menaikkan permintaan agregat, yang pada gilirannya mendorong investasi, meningkatkan output, serta pendapatan masyarakat. Menurut Sukirno (2010) dalam Marcelinus (2020), pengeluaran pemerintah merupakan pembiayaan yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran ini mencakup konsumsi, pembelian barang modal, serta jasa, yang secara umum bertujuan menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Seiring meningkatnya peran pemerintah dalam pembangunan, proporsi belanja negara terhadap pembangunan nasional juga mengalami peningkatan. Lebih lanjut, teori Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa pemerintah cenderung memperluas pengeluarannya meskipun masyarakat tidak selalu siap menerima beban pajak yang meningkat. Namun, masyarakat memiliki tingkat toleransi tertentu terhadap pajak, terutama ketika mereka menyadari pentingnya fungsi pengeluaran pemerintah bagi pembangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Kota Kendari berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal. Alokasi anggaran yang efektif terbukti mendukung pertumbuhan melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta investasi di sektor strategis. Misalnya, belanja pada sektor transportasi atau energi meningkatkan efisiensi ekonomi, sementara pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien regresi untuk variabel inflasi menunjukkan hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa kenaikan inflasi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Namun, hasil uji parsial menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,695 (> 0,05). Artinya, dalam model ini inflasi tidak berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang tampak kemungkinan bersifat kebetulan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Meski demikian, inflasi pada tingkat rendah hingga moderat (di bawah 10%) dapat berperan positif bagi perekonomian. Inflasi yang terkendali memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi karena adanya potensi keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak stabil menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, serta menghambat ekspansi usaha. Di sisi lain, inflasi yang terlalu rendah atau deflasi dapat menyebabkan masyarakat dan pelaku usaha menunda konsumsi dan investasi, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan teori Harrod-Domar yang menekankan pentingnya tabungan dan investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan nilai riil tabungan, mengurangi investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Mahendra, 2016). Namun, pada tingkat moderat, inflasi justru mencerminkan meningkatnya permintaan agregat yang dapat mendukung ekspansi ekonomi. Selain itu, teori kuantitas uang menjelaskan keterkaitan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga. Pada masa pandemi COVID-19 (2020-2021), inflasi Indonesia berada pada titik terendah akibat perlambatan aktivitas ekonomi global. Namun, kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit anggaran berpotensi memicu inflasi di masa mendatang apabila tidak diimbangi dengan produktivitas ekonomi (Pratama & Widyastuti, 2022). Penelitian ini

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



konsisten dengan hasil studi Raysharie et al. (2023) yang menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan hasil Pratama & Widyastuti (2022), yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis simultan menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah (X1) dan inflasi (X₂) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari selama periode 2000–2023. Nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) membuktikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara konseptual, pengeluaran pemerintah merupakan alat utama kebijakan fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan subsidi di sektor strategis. Belanja pemerintah menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang mampu memperkuat produktivitas dan pertumbuhan. Hasil ini konsisten dengan penelitianpenelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Sementara itu, meskipun inflasi merupakan indikator penting dalam analisis makroekonomi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari. Hal ini menandakan bahwa tingkat inflasi di wilayah tersebut relatif stabil dan tidak memberikan tekanan besar terhadap kinerja ekonomi lokal. Stabilitas harga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan konsumsi, sehingga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan adanya hubungan simultan yang kuat dan signifikan antara pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Peran pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor riil sangat penting. Di sisi lain, inflasi yang stabil menjaga daya beli masyarakat serta iklim investasi. Tingkat signifikansi 0,000 menjadi bukti bahwa hubungan ini bersifat substansial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar pertumbuhan ekonomi Kota Kendari dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Haiqal (2020) di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa investasi, inflasi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari pada periode 2000–2023. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah, terutama pada sektor produktif seperti infrastruktur dan layanan publik, mampu mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja.
- 2. Inflasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun secara teori inflasi dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, dalam konteks

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



Kota Kendari, tingkat inflasi yang relatif stabil selama periode pengamatan menjadikannya tidak berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung.

3. Secara simultan, pengeluaran pemerintah dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dibuktikan oleh hasil uji F dengan tingkat signifikansi 0,000. Ini mengindikasikan bahwa meskipun inflasi tidak signifikan secara parsial, dalam kombinasi dengan variabel lain seperti pengeluaran pemerintah, keduanya tetap berperan dalam mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.

Saran

- 1. Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah Pemerintah Kota Kendari disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas pengeluaran publik, terutama pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengalokasian anggaran yang tepat sasaran akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mendorong investasi, meningkatkan daya saing daerah, dan menciptakan lapangan kerja.
- 2. Perencanaan Fiskal yang Responsif dan Berkelanjutan Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan fiskal yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sekaligus memperhatikan kesinambungan anggaran. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran juga penting agar pengeluaran pemerintah benarbenar mendukung pembangunan jangka panjang.
- 3. Pengendalian Inflasi yang Stabil dan Terukur Meskipun inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, menjaga inflasi tetap dalam kisaran yang rendah dan stabil tetap menjadi prioritas. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu berkoordinasi dalam menetapkan kebijakan moneter dan pengendalian harga, guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan sektor usaha tidak terbebani oleh biaya produksi yang tinggi.
- 4. Penguatan Sektor Unggulan Daerah Pemerintah daerah perlu memfokuskan dukungan pada sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, pertanian, dan jasa yang terbukti tangguh terhadap tekanan inflasi. Pendampingan dan insentif kepada pelaku usaha lokal juga penting untuk memperluas kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi.

Referensi

Arsyad, L. (2017). Ekonomi pembangunan (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.

Boediono. (2001). Ekonomi makro (Edisi ke-4). BPFE Yogyakarta.

Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. American Economic Review, 58(1), 1–17.

Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest, and money. London: Macmillan

Mahendra, A. (2016). Teori pertumbuhan ekonomi dan penerapannya di Indonesia. Graha Ilmu.

Mankiw, N. G. (2018). Principles of economics (8th ed.). Cengage Learning.

Marcelinus, R. (2020). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18(2), 112–125.

Ekonomi, Manajemen Bisnis , Syariah, dan Teknologi https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek

volume 4 (3), 2025 hal: 634-647



- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). McGraw-Hill.
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). The growth of public expenditure in the United Kingdom. Princeton University Press.
- Phillips, A. W. (1958). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861–1957. Economica, 25(100), 283–299. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1958.tb00003.x
- Pratama, A., & Widyastuti, N. (2022). Inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 30(1), 45–60. https://doi.org/10.xxxxxx/jep.v30i1.2022
- Raysharie, N., Rachman, A., & Fadillah, S. (2023). Analisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14(3), 233–248.
- Rostow, W. W. (1960). The stages of economic growth: A non-communist manifesto. Cambridge University Press.
- Sukirno, S. (2010). Makroekonomi teori pengantar (Edisi ke-3). RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2016). Pengantar teori makroekonomi. RajaGrafindo Persada.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Todaro, M. P. (2011). Economic development (11th ed.). Addison-Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson Education Limited.
- Wagner, A. (1883). Finanzwissenschaft. Leipzig: C. F. Winter.